

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Game plan pengawasan dan penertiban senjata api di tingkat Basecamp Polri dibagi menjadi beberapa tahap, khususnya latihan yang dilakukan sebelum keluarnya hibah kepemilikan senjata dimana Polri harus melihat pemenuhan kebutuhan disampaikan dan dilihat apakah dapat meniadakan prasyarat tersebut dan memberikan pengarahan kepada daerah yang berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian senjata dan tembakan yang telah mendapat persetujuan dari Kapolri sesuai dengan Pedoman Umum Polri Nomor 1 Tahun 2022.
2. Pemberian izin dan pengawasan yang ketat seperti ini tampaknya tidak berpengaruh jauh, padahal di Indonesia aliran senjata ilegal di Indonesia termasuk yang paling berkurang di muka bumi. Dalam hal senjata api disalahgunakan, maka izin penggunaan senjata api (dengan memperhitungkan hibah tidak tetap) dapat dicabut oleh pihak yang berhak memberikannya dengan anggapan bahwa senjata api digunakan secara tidak benar, dan senjata api tersebut dapat disita sesuai dengan Pedoman Tata Tertib Kerja. Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

B. Saran –saran

Terlepas dari kenyataan bahwa ada pedoman berbeda untuk mengelola senjata dan penggunaannya, itu masih sangat menarik:

1. Pekerjaan otoritas Publik sangat diharapkan untuk menawarkan bantuan mengenai pedoman berat mengenai tanggung jawab untuk membuat pedoman kemudian mengawasi keadaan tanggung jawab.

2. Otoritas publik harus membantu semua organisasi, dalam hal ini Kepolisian, untuk secara tegas mengarahkan dan menindak senjata yang ada agar tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang mengarah pada demonstrasi yang melanggar hukum.